

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT PERDESAAN DI DESA  
JLUMBANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI**

Alan Dwi Hadi Saputro

NPP. 30.0772

*Asdaf Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: hadisaputro48@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyono, S.Sos., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** As a basic public service, drinking water and sanitation services had become compulsory business for local governments. In providing drinking water and sanitation services that meet minimum services (SPM) to support the capacity of local governments. The study is against the background of pamsimas programs in some villages in passive or deceased self-sector and the village of jlumbang bang is one of the most passive and troubling villages.

**Purpose:** The purpose of research is to know the extent to which people's empowerment for water management and sanitation systems in the village of Jlumbang, sub-district of Kandangan, Regency of Kediri. **Method:** This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is based on the opinion of Mardikanto (2019: 113-117) which has four main community empowerment efforts, namely Human Development, Business Development, Environmental Development and Institutional Development. Procedures for inputting data using observation, interview, and documentation methods. Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

**Result:** The research results show that community empowerment in the management of rural community-based drinking water supply and sanitation systems in Jlumbang Village has not been maximized because there are still obstacles in the Pamsimas program, namely expensive operational costs for villages with small users.

**Conclusion:** Public empowerment for water supply and sanitation systems is based on the country's low population in the village of jlumbang district district district in public execution is going well; Human development groups have often been responsible for development of the capacity of individuals not only in village jlumbang but all villages in kedistrict, building a business by including in village development development development so that the result of this program can become the village's original income for jlumbang village, building institutions and organizations in jlumbang for each other's efforts to help smooth the program, Bina the environment in green environmental conservation still needs to be rebuilt because for the environment around the jlumbang village has no springs so that the village of jlumbang cannot have its own fresh water flow.

**Keywords:** Empowerment, Pamsimas, Rural

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sebagai pelayanan publik yang mendasar, pelayanan air minum dan sanitasi sudah menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Program PAMSIMAS di beberapa desa di Kabupaten Kediri yang pasif atau mati dan Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan merupakan salah satu desa yang pasif dan memiliki permasalahan yang paling parah. **Tujuan:** Tujuan penelitian yaitu mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di desa Jlumbang kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. **Metode:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berdasarkan pendapat Mardikanto (2019:113-117) yang memiliki empat pokok upaya pemberdayaan masyarakat yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan. Prosedur penginputan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di Desa Jlumbang belum maksimal karena masih ditemukannya kendala dalam program Pamsimas yaitu biaya operasional yang mahal untuk desa dengan pengguna sedikit. **Kesimpulan:** Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya secara umum sudah berjalan dengan baik; Bina Manusia Sudah sering mengadakan BimTek untuk pengembangan kapasitas individu tidak hanya di Desa Jlumbang tapi seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri, Bina Usaha dengan memasukkan KP SPAMS dalam unit Badan Usaha Milik Desa mereka sehingga hasil dari program ini dapat menjadi Pendapatan Asli Desa bagi Desa Jlumbang, Bina Kelembagaan yaitu aktifnya lembaga dan organisasi yang ada di Desa Jlumbang untuk saling bahu membahu membantu kelancaran program Pamsimas, Bina Lingkungan dalam bidang pelestarian lingkungan hijau masih perlu ditingkatkan kembali karena untuk lingkungan di sekitar Desa Jlumbang tidak memiliki sumber mata air sehingga Desa Jlumbang belum bisa memiliki aliran air bersih sendiri.

**Kata kunci:** Empowerment, Pamsimas, Rural

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan air yang dari tahun ketahun terus meningkat disebabkan karena perkembangan penduduk dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan air yang berkualitas air yang awalnya sebagai public goods atau barang milik umum yang tersedia melimpah menjadi barang yang langka. Adanya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Undang-undang ini mengatur bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat Indonesia juga berhak atas air rakyat dengan mengutamakan penggunaan sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 (pasal 8 ayat 2) yaitu prioritas I untuk kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian prioritas II untuk pertanian rakyat dan prioritas III untuk kebutuhan usaha.



Kebutuhan air yang dari tahun ketahun terus meningkat disebabkan karena perkembangan penduduk dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan air yang berkualitas air yang awalnya sebagai public goods atau barang milik umum yang tersedia melimpah menjadi barang yang langka. Adanya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Undang-undang ini mengatur bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat Indonesia juga berhak atas air rakyat dengan mengutamakan penggunaan sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 (pasal 8 ayat 2) yaitu prioritas I untuk kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian prioritas II untuk pertanian rakyat dan prioritas III untuk kebutuhan usaha.

Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun atau menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan yang mampu diadaptasi oleh masyarakat. PAMSIMAS dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa. Sasaran kebijakan ini meliputi kelompok miskin di pedesaan dan pinggiran kota yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). (Pedoman Umum Program PAMSIMAS edisi 2022:10).

Alasan pemerintah membentuk program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah agar efektif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya, miskin) dan pendekatan yang tangggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan dengan proses pemberdayaan masyarakat agar menumbuhkan inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, menyiapkan, memutuskan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah, sehingga masyarakat bersedia berkontribusi dan ikut rasa memiliki terhadap apa yang telah dilakukan.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, pelayanan air minum dan sanitasi sudah menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah, Program Pamsimas berfungsi untuk memberikan dukungan finansial baik investasi fisik berupa sarana dan prasarana maupun investasi non fisik berupa pengelolaan, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri mendapatkan Program Pamsimas I, II, dan III dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 83 titik. Namun kondisi saat ini menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, terdapat 13 titik Desa Kelompok Masyarakat Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang pasif/mati atau tidak beroperasi. Dari 13 titik Desa 4 diantaranya berada di Kecamatan Kandangan yang merupakan Kecamatan dengan Desa yang program Pamsimasnya paling banyak pasif. Salah satunya adalah Desa Jlumbang, dengan kondisi paling parah dibandingkan dengan Desa Mlancu, di desa Mlancu sebagian masyarakat sudah mempunyai sumur untuk mengambil air tanah sehingga sebagian warga sudah bisa memiliki akses air, namun juga ada sebagian warga yang masih mengangkut air dari sumber air di desa lain untuk di bawa ke Desa

Mlancu, dengan kondisi yang lebih parah dari Desa Mlancu, Desa Jlumbang memiliki kondisi air bakunya yang sudah kotor sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan layak bahkan jika membuat sebuah sumur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program PAMSIMAS membuat Tim Pelaksana yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah meliputi Badan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki Fungsi dalam pembinaan sarana air bersih yang ada di perdesaan. Sehingga menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan pada kelompok masyarakat Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang pasif/mati atau tidak beroperasi.

Dengan adanya program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi di tahun 2019 dengan capaian target untuk pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100% akses air minum, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Tentunya kondisi saat ini yang ada di Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan penyusun sebagai referensi agar lebih berkembang. Penelitian Larasati Retno Palupi dari Universitas Brawijaya berjudul Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Malang (Larasati Reto Palupi, 2018), menemukan bahwa Aktor sebagai pelaksana Pamsimas terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat Desa Gunungronggo. Aktor pelaksana dari tingkat pusat sampai tingkat desa sudah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Aspek komunikasi, Pamsimas dikomunikasikan ke masyarakat melalui sosialisasi dari, komunikasi antar aktor melalui rapat dan media sosialisasi seperti poster. Aspek sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan peralatan. Aspek SDM dalam implementasi kebijakan Pamsimas ditingkat kabupaten jumlahnya dan kualitasnya cukup sedangkan ditingkat desa SDMnya masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Aspek Sumber daya anggaran Pamsimas di Desa Gunungronggo cukup yakni dengan jumlah anggaran Rp. 350.000.000 sedangkan aspek sumber daya peralatan sudah cukup baik namun masih kurangnya fasilitas seperti kantor dan peralatan lain yang dapat menunjang keberlanjutan program Pamsimas (Larasati Reto Palupi, 2018).

Penelitian Rachmawati Dwi Maharani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul penelitian Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Lebak. Penelitian Agustino menemukan bahwa Rachmawati Dwi Maharani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul penelitian Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Lebak (Rachmawati Dwi Maharani, 2014).

Penelitian Riska Firdaus dari Universitas Andi Djemma Palopo dengan judul penelitian Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan hasil penelitian Riska Firdaus ditemukan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara belum



berjalan dengan baik dan dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan sistem program Pamsimas ini (Riska Firdaus, 2020).

Penelitian Sri Nengsi dengan judul penelitian Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil penelitian Sri Nengsi ditemukan bahwa Terpeliharanya manfaat sarana air bersih dan sanitasi sejak dibangun Tahun 2014 sampai dengan penelitian ini berlangsung. Selain itu terlihat dari terpeliharanya sumber air baku dan masyarakat melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; Terbentuknya Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAM) sebagai Institusi lokal dalam mengelola sarana air bersih. BPSPAM menjadi organisasi yang telah di SK kan oleh Pemerintah Desa, hanya saja BPSPAM ini tidak berbadan hukum sesuai akta notaris dikarenakan prosedur yang belum begitu dipahami oleh pengurus BPSPAM (Sri Nengsi, 2018)

Penelitian Andito Shidiq, Dkk dengan judul penelitian Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa dengan keberlanjutan pada aspek sosial, keuangan, lingkungan, kelembagaan dan teknis mempunyai tingkat keberlanjutan yang sangat baik sedangkan desa dengan keberlanjutan pada salah satu aspek saja mempunyai tingkat keberlanjutan yang rendah. Keberlanjutan SPAM Desa dipengaruhi oleh modal sosial dan modal manusia yang dimiliki. Faktor modal sosial yang mempengaruhi berupa jaringan hubungan sosial yang kuat, kepercayaan, dan norma aturan, sedangkan faktor modal manusia yang berpengaruh berupa motivasi, komitmen, efektivitas tim kerja dan kepemimpinan (Andito Shidiq, Dkk, 2021)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, metodenya yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai fokus penelitian. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Totok Mardikanto dan Soebianto, (2019) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu: Bina Usaha, Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai fokus penelitian dan menganalisis data melalui tiga tahapan yakni data reduction, data display dan conclusion drawing Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2020:248-254).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Camat Kandangan, Kepala Seksi Pemberdayaan Desa, Kepala Desa Jlumbang, Masyarakat Desa Jlumbang sebanyak 5 orang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri menggunakan pendapat dari Totok Mardikanto dan Soebianto, (2019) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu: Bina Usaha, Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Perdesaan Di Desa Jlumbang

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri di Desa Jlumbang berupa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan. Berawal dari masyarakat Desa Jlumbang yang menggunakan air keruh pada kegiatan sehari-hari, pada zaman dahulu sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, telah ditargetkan untuk Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak (kota dan desa) adalah 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada Pasal 12 Ayat (2) butir (n) memiliki fungsi dalam pembinaan sarana air bersih, sehingga hal tersebut selaras dengan Teori Pemberdayaan menurut Mardikanto (2019:113-117), lingkup empat upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan.

##### a. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang harus diperhatikan pertama kali dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, bina manusia termasuk dalam kegiatan pemberdayaan karena bertujuan untuk pembangunan dalam memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bina manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu kegiatan pelatihan kepada masyarakat dalam pengembangan kapasitas individu.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah dengan memberikan BimTek (Bimbingan Teknis) dalam penggunaan aplikasi catat meter air yang dikelola oleh Desa, baik itu oleh Kelompok Pengelola SPAMS maupun Unit Pengelola Air Minum BUMDes di Kabupaten Kediri. Aplikasi Catat Meter ini diciptakan sendiri oleh salah satu Pengurus KP SPAMS yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Saudara Fauza Ikhwanul Muslim dari KP SPAMS "Nadiroso" Desa Jajar Kecamatan Wates dan Saudara Dedi Peni Septiawan dari Bumdes "Berkah Bagawan" Desa Siman Kecamatan Kepung.

Dengan Aplikasi Catatmeter.com petugas SPAMS dapat langsung melakukan pencatatan meter air minum menggunakan smartphone melalui metode GIS (Geographic Information System) ataupun scan QR Code tanpa harus mencatat secara manual. Selain itu, Info Tagihan Pembayaran dapat langsung dikirim kepada pelanggan melalui pesan Whatsapp. Pembayaran Tagihan juga dapat dilakukan di tempat pada saat itu juga. Selain Fitur Pencatatan dan Pembayaran, Aplikasi ini juga menyajikan Fitur Pengelolaan Keuangan SPAMS Perdesaan.

##### b. Bina Usaha



Bina Usaha dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian yang penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha dalam yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah dengan membuat setiap KP SPAMS di seluruh Kabupaten Kediri dimasukkan dalam salah satu Unit BUMDes.

Dimasukkannya KP SPAMS ke dalam salah satu Unit BUMDes adalah karena sistem pengelolaan program PAMSIMAS ini dikelola oleh masing-masing desa sehingga dapat berpotensi menjadi PAD (Penghasilan Asli Desa) sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan dapat dijadikan sampingan pekerjaan sembari mencari pekerjaan yang sesungguhnya.

**c. Bina Lingkungan**

Dalam bina lingkungan, pelaksanaan proses pemberdayaan perlu memperhatikan lingkungan fisik terutama terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap terjaga. Pemberdayaan Masyarakat dalam hal sanitasi di Desa Jlumbang sudah berjalan sejak tahun 2018, sebelum tahun 2018 masyarakat Desa Jlumbang masih buang air besar sembarangan di sungai. Setelah tahun 2018 Desa Jlumbang sudah dibebaskan dari buang air besar sembarangan ditandai diberikannya piagam dari Bupati Kediri yaitu mewujudkan desa ODF (Open Defecation Free) stop dari buang air besar sembarangan. Berikut adalah gambar piagam yang diberikan oleh Bupati Kediri kepada Desa Jlumbang.

Namun dalam pelestarian lingkungan seperti reboisasi lingkungan belum bisa dilaksanakan di Desa Jlumbang dikarenakan kebanyakan lahan di Desa Jlumbang adalah lahan pertanian untuk Tebu. Padahal letak lokasi geografis Desa Jlumbang adalah di bawah kaki Gunung Anjasmoro dimana biasanya terdapat banyak mata air karena dekat dengan sebuah gunung. Adanya mata air dapat menjadikan alternatif lain pengambilan air selain dari sumur bor.

**d. Bina Kelembagaan**

Bina kelembagaan merupakan peran kelembagaan terkait dengan keefektifan dan keberhasilan dari dimensi Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Ketiga dari bina tersebut akan dapat terwujud seperti apa yang ingin diharapkan apabila hal ini didukung oleh kelembagaan. Bina kelembagaan di Desa Jlumbang berjalan dengan baik dilihat dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Tim SPAMS Tirta Makmur, PKK, RT, RW dan lembaga serta organisasi lainnya yang ada di Desa Jlumbang. Setiap kelembagaan mempunyai peran penting dalam bahu membahu untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang bagaimana program dapat berjalan dengan baik.

### **3.2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PAMSIMAS**

Hambatan yang dihadapi Desa Jlumbang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaaan selain air baku dari Desa Jlumbang yang keruh sesuai data yang di dapat peneliti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri fakta di lapangan hambatan yang ditemukan oleh peneliti adalah biaya operasional untuk memompa air dari sumur pengeboran ke bak penampungan air. Hal ini dikarenakan mesin pompa yang digunakan untuk memompa air adalah mesin pompa air dengan watt yang besar sehingga membutuhkan daya yang besar juga sehingga membuat biaya penggunaan listrik juga besar.

Hambatan ini juga dirasakan oleh desa-desa lain dimana biaya listrik yang digunakan untuk memompa air mahal jadi tidak hanya Desa Jlumbang saja yang merasakan. Namun hambatan ini tidak

ditemui di desa dengan pengguna atau pelanggan yang banyak jadi biaya operasional listrik untuk memompa air dapat teratasi jika pengguna atau pelanggan yang menggunakan air di desa banyak. Seperti Desa Banaran dimana penggunanya atau pelanggannya lebih dari 200 sehingga biaya operasional listrik untuk memompa air dapat tertutupi atau teratasi bahkan KPSPAMS nya mendapatkan laba sehingga dapat dimasukkan dalam pendapatan unit BUMDes Desa Banaran. Berikut adalah data pelanggan perdesa yang ada di Kabupaten Kediri.

### **3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PAMSIMAS**

Pemerintah Desa Jlumbang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Program Pamsimas berupaya mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum untuk pembuatan jalur air dengan pipa dari mata air di Desa Medowo ke Desa Jlumbang, upaya tersebut dilaksanakan agar masyarakat tidak perlu membayar dengan mahal dalam menggunakan akses air bersih karena menggunakan mata air, biaya yang dikeluarkan warga yang semulanya habis untuk penggunaan biaya operasional listrik untuk memompa air dapat dialihkan dan digunakan untuk kegiatan lain seperti pemeliharaan dan lain-lainnya, karena menggunakan mata air tidak perlu menggunakan pompa air yaitu hanya mengandalkan gaya gravitasi dimana letak Desa Medowo yang lebih tinggi dari Desa Jlumbang.

Namun fakta dilapangan jarak antara Desa Medowo dengan Desa Jlumbang sangatlah jauh dikarenakan Desa Jlumbang yang letaknya di kaki Gunung Anjasmoro dan letak Desa Medowo yang berada tengah Gunung Ajasmoro, jarak antara Desa Medowo dengan Desa Jlumbang kurang lebih  $\pm 7,5$  Km sehingga membutuhkan dana yang besar dalam pembuatan jalur air dengan menggunakan pipa. Dalam pengajuan seperti yang dilakukan oleh Desa Jlumbang tentunya tidak akan langsung di terima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dikarenakan setiap pengajuan pembangunan ditentukan oleh prioritas pembangunan dan urgency atau keadaan yang paling mendesak dari sebuah daerah yang mengajukan pembangunan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dalam sarana akses air dan sanitasi. Penulis menemukan temuan baru penting dimana jika pelanggan air dalam satu desa sedikit maka biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dan operasional akan kurang jika pelanggan air banyak maka biaya untuk pemeliharaan dan operasional akan cukup bahkan surplus sehingga dapat dimasukkan dalam PAD (Pendapatan Asli Desa). Temuan ini merupakan temuan baru dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat berguna jika pemerintah ingin menerapkan program PAMSIMAS ini kepada desa-desa yang belum diterapkan.

Layaknya pemberdayaan lainnya, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya tenaga kerja, kurangnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung dikantor, layaknya temuan (Larasati Retno Palupi, 2018).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan PAMSIMAS di Desa Jlumbang belum maksimal karena masih ditemukannya kendala dalam program PAMSIMAS yaitu biaya operasioal yang mahal untuk desa dengan pengguna sedikit. Namun untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem



penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di Desa Jlumbang Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya secara umum sudah berjalan dengan baik; Bina Manusia Sudah sering mengadakan BimTek untuk pengembangan kapasitas individu tidak hanya di Desa Jlumbang tapi seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri, Bina Usaha dengan memasukkan KP SPAMS dalam unit Badan Usaha Milik Desa mereka sehingga hasil dari program ini dapat menjadi Pendapatan Asli Desa bagi Desa Jlumbang, Bina Kelembagaan yaitu aktifnya lembaga dan organisasi yang ada di Desa Jlumbang untuk saling bahu membahu membantu kelancaran program Pamsimas, Bina Lingkungan dalam bidang pelestarian lingkungan hijau masih perlu ditingkatkan kembali karena untuk lingkungan di sekitar Desa Jlumbang tidak memiliki sumber mata air sehingga Desa Jlumbang belum bisa memiliki aliran air bersih sendiri.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sehingga tidak mengetahui permasalahan di desa lain di wilayah Kabupaten Kediri apakah sama dengan Desa Jlumbang.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Kediri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Sehingga juga dapat dijadikan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan sebuah program pemberdayaan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Jlumbang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andito Sidiq Swastomo, D. A. (2021). Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati*, 14-27.
- Firdaus, R. (2020). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 1-8.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nengsi, S. (2018). Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 33-42.
- PAMSIMAS, S. (2022). *Pedoman Umum Program PAMSIMAS*. Jakarta: Sekretariat PAMSIMAS.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skrpsi:

Maharani, D, R (2014). *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Lebak*. Skripsi. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Palupi, R, L (2018). *Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri

